

STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI SINGKONG DAN PENGUSAHA TAPE MELALUI KEBIJAKAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Nian Riawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstrak

Strategi pemberdayaan masyarakat tape dapat dilakukan melalui regulasi kebijakan Pemerintah daerah Bondowoso. beberapa masalah yang terjadi seperti *pertama*, penurunan Produksi Singkong yang disebabkan banyaknya petani singkong beralih pada komoditas lainnya seperti kopi atau jagung. *Kedua*, corak pertanian petani Singkong yang masih tradisional. *Ketiga*, minimnya keterampilan (*life skill*) yang dimiliki oleh petani singkong. Keempat, ketidakstabilan harga singkong menyebabkan petani Singkong mengalami kerugian. *Kelima*, kesulitan akses modal dan pasar. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah : *pertama*, membuat regulasi dengan melakukan proteksi terhadap daerah pertanian singkong dan melindungi industri tape mulai hulu hingga hilir. *Kedua*, Membuat lembaga penelitian dan pengembangan produk singkong *Ketiga*, memberikan Melakukan pembimbingan dan peningkatan keahlian (*life skill*) pengrajin olahan tape dan memberikan bantuan teknologi tepat guna (modernisasi peralatan pertanian). *Keempat*, regulasi terkait kontrol harga dasar Singkong. *Kelima*, memberikan kemudahan dalam permodalan dan akses pasar.

Kata Kunci : singkong, pemberdayaan masyarakat, deskriptif kualitatif.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bondowoso dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian di bidang pertanian. Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan menduduki peringkat utama dalam menyumbang PDRB Kabupaten Bondowoso, kontribusinya sebesar 33,72 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso. Dari seluruh luas wilayah yang ada di Kabupaten Bondowoso 90,08 persen digunakan untuk pertanian yaitu persawahan, tanah kering, perkebunan, kehutanan, rawa dan tambak. Bila dirinci menurut penggunaannya, lahan terluas digunakan untuk kehutanan yaitu sebesar 35,77 persen. Kemudian urutan terluas berikutnya adalah lahan yang digunakan untuk tegalan/tanah kering 27,66 persen dan digunakan persawahan sebesar 20,74 persen sedangkan digunakan untuk perkebunan 5,68 persen dan sisanya 0,22 persen merupakan Rawa/Danau /waduk dan kebun campur. (BPS Kabupaten Bondowoso 2013).

Tabel 1. Luas Lahan dan Produksi Pertanian di Kabupaten Bondowoso

No	Komoditi	Luas Panen		Produksi	
		2013	2014	2013	2014
1	Padi	63.049	61.431	371.800	366.532

2	Jagung	41.436	35.361	103.119	177.795
3	Singkong	6.039	4.744	131.723	104.904
4	Kedelai	33	58	47	84

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Berdasarkan data tersebut, Potensi tanaman pangan yang mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Bondowoso adalah Komoditas padi, jagung, ubi kayu/singkong, kedelai. Padi merupakan produk pertanian utama yang mempunyai luas panen dan jumlah produksi terbanyak, di peringkat kedua jagung dan kemudian disusul singkong. Tidak seperti komoditas padi, jagung dan kedelai yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, Komoditas Singkong justru mengalami penurunan setiap tahunnya.

Penurunan Komoditi Singkong tersebut berpengaruh terhadap produk industri tape Kabupaten Bondowoso. Indonesia terkenal dengan sebutan “kota tape” karena rasanya yang manis. Singkong merupakan bahan baku pembuatan tape bondowoso dengan kualitas yang paling baik dibandingkan singkong daerah lain. Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Agus Salam mengatakan, Bondowoso didukung oleh sumber daya alam dan cuaca yang bagus. Ini sangat mendukung untuk menghasilkan kualitas yang baik untuk tanaman singkong.

Besarnya kontribusi sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso sebesar 42,89 % seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kegiatan industri. Tetapi pada sektor industri, kontribusi yang disumbangkan terhadap PDRB cukup kecil yakni hanya sebesar 16,25 %. Potensi dari sektor pertanian yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan sektor industri.

Tabel 2. Distribusi PDRB Kabupaten Bondowoso tahun 2013

No	Uraian	2013
1	Pertanian	42,89
2	Pertambangan dan penggalian	0,72
3	Industri pengolahan	16,25
4	Listrik, gas dan air bersih	0,55
5	Bangunan	1,42
6	Perdagangan, Hotel dan restoran	26,58
7	Pengangkutan dan komunikasi	1,46
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	2,45
9	Jasa-jasa	7,60

Sumber : BPS PDRB Kab Bondowoso tahun 2013

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi pada sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso belum mampu menghasilkan nilai tambah (*added value*) dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut dapat

dilihat dari kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso yang masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat kesejahteraannya, sebesar 246.357 jiwa atau 34,20 % penduduk Kabupaten Bondowoso berada pada tingkat penduduk miskin. Selain itu Kabupaten Bondowoso juga termasuk dalam 122 Daerah tertinggal se Indonesia, bahkan terpuruk menduduki peringkat pertama di daerah Jawa Timur. Penetapan itu tertuang dalam peraturan presiden (PERPRES) NO:131/2015 tentang penetapan daerah tertinggal Tahun 2015 -2019.

Selain itu belum ada kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat tape (petani singkong, pengusaha tape, pengrajin besek tape, pengrajin kue olahan tape). Masyarakat tape miskin bimbingan keahlian, keberpihakan kebijakan seperti permodalan dan kemudahan perijinan. Mereka berjuang sendiri sehingga permasalahan tersebut tidak pernah tuntas.

Penelitian terdahulu terkait dengan Singkong diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Febrilina (2016) yang membahas mengenai ketersediaan Bahan baku singkong untuk industri di Kabupaten Jember dan Penelitian Indrayati (2013) yang membahas mengenai pemberdayaan petani singkong di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pertanian dan Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember membantu petani singkong namun belum menggugah petani di Kabupaten Jember untuk meningkatkan produksi singkong. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, keterbatasan studi tersebut dilakukan pada ruang lingkup mikro dan sangat kasuistik sehingga hasil studi ini tidak bisa digeneralisir pada kelompok sasaran lain ditempat yang berbeda.

Kebijakan Publik

Secara sederhana, Dye (1981:1) mendefinisikan kebijakan sebagai "*is whatever governments choose to do or not to do*". Definisi ini mengandung dua kata kunci, yaitu tindakan pemerintah untuk memilih dan tidak memilih, baik memilih untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, Steven A. Peterson (dalam Nugroho 2009:83) mendefinisikan kebijakan sebagai "*government action to address some problem*". Melalui definisi ini dapat diartikan bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah masyarakat (*problem solver*) ketika kebijakan tersebut mengandung unsur-unsur nilai dalam masyarakat.

Definisi lebih rinci diberikan oleh Carl Friedrich (dalam Wahab 2002:3) yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selain mencerminkan sebuah tindakan pemerintah, definisi yang diberikan Friedrich ini mengindikasikan adanya interaksi antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat dalam sebuah kebijakan untuk menghimpun nilai dan kepentingan masyarakat dalam rumusan kebijakan. Untuk itulah, dalam siklus pembuatan kebijakan publik, membutuhkan aktivitas analisis kebijakan yang dapat menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan (Lasswell, 1971: 1).

Ketersediaan Bahan baku sebagai bahan produksi Unggulan (tape)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian menjelaskan mengenai definisi dari bahan baku, Bahan baku merupakan bahan mentah, barang setengah jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bahan baku industri merupakan salah satu komponen dalam produktivitas suatu industri untuk menghasilkan produk unggulan. Sedangkan ketersediaan adalah stok bahan yang digunakan produsen untuk menghasilkan barang jadi. Pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan atau aktifitas untuk memelihara dan mengendalikan, selain itu juga merupakan teknik pemesanan dan pemantauan atau pengawasan barang-barang dalam jumlah, kuantitas dan waktu yang sesuai dengan yang telah direncanakan Suswardji dalam Febrilina (2016).

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep Pemberdayaan (empowerment), Iffe (1995) mengungkapkan "*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on*". Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Selain itu Paul (1987) dalam Purbathin hadi (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam Purbathin Hadi (1996) Pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Dari beberapa pendapat diatas, Pemberdayaan mempunyai dua ciri yaitu, pertama, mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini disertai dengan membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian secara organisasi. Kedua, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dalam Sumodiningrat (2002).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menyajikan gejala atau peristiwa pada suatu objek penelitian (Patton,2009).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso. Sebagai sumber data serta untuk penggalan data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu. Organisasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dan industri tape serta para stakeholder yang terlibat dalam proses produksi. Sedangkan pada tingkat individu adalah masyarakat tape (petani singkong, pengrajin besek dan pengrajin olahan tape) sebagai subyek/pelaksana dari produksi tape.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif murni. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat (Miles and Huberman, 1992:2). Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu wawancara mendalam dan observasi.

PEMBAHASAN

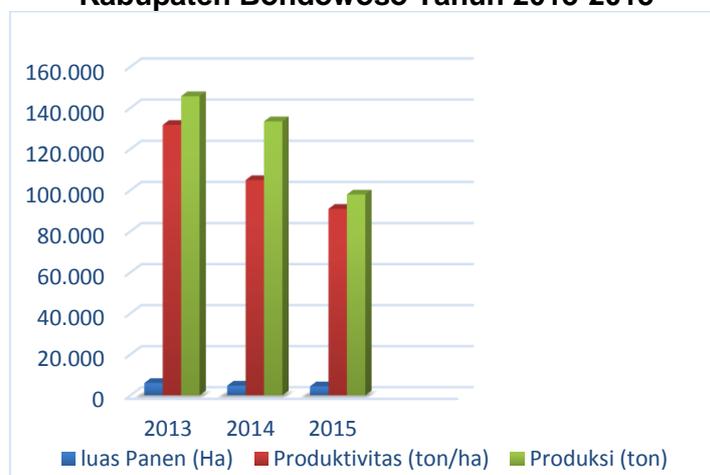
Produksi Singkong

Penggunaan lahan di Kabupaten Bondowoso sebagian besar untuk tegalan atau tanah kering sebesar 347,11 atau sebesar 22,25 % dari keseluruhan penggunaan lahan

di Kabupaten Bondowoso (Bondowosokab.go.id). Besarnya Penggunaan Lahan kering/tegalan sangat cocok untuk pertanian ubi kayu (singkong) di Kabupaten Bondowoso. Ubi kayu sebagai bahan utama pembuatan tape memiliki produksi yang cukup tinggi yakni menempati peringkat ketiga dalam produksi tanaman pangan Kabupaten Bondowoso.

Ubi Kayu sebagai Bahan Baku Produk Unggulan Industri Tape Kabupaten Bondowoso mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Perputaran ekonomi dari kegiatan ekonomi industri tape sangat menguntungkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. Petani singkong mendapatkan jaminan bahwa hasil panennya akan terjual kepada para pengusaha Industri tape di Kabupaten Bondowoso sedangkan Industri tape juga akan menyerap tenaga kerja sehingga terjadi perputaran kegiatan ekonomis pada industri tape. Namun ketersediaan ubi kayu di Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan menurun. Produksi ubi kayu di Kabupaten Bondowoso data tiga tahun terakhir dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami tren penurunan pada luas lahan yang akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas ubi kayu.

Grafik 1. Tren Penurunan Luas Lahan, Produktivitas, Dan Produksi Ubi Kayu Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2015



Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso (2001-2007)

Penurunan Bahan baku singkong di Kabupaten Bondowoso disebabkan karena banyaknya Petani Singkong yang beralih kepada tanaman komoditas lainnya seperti padi dan jagung. Dengan banyaknya petani yang beralih dari tanaman singkong ke tanaman padi dan jagung mengakibatkan areal panen, produktivitas dan produksi singkong di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami

penurunan. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Samsul selaku staf Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

“... Petani singkong di Kabupaten Bondowoso banyak beralih ke tanaman lainnya seperti jagung dan padi karena harga singkong yang terus anjlok sekarang saja harga singkong per kilonya hanya 500/kg jadi petani singkong banyak yang beralih ke tanaman komoditas lainnya karena dianggap prospeknya lebih bagus daripada singkong...”

Selain karena banyaknya pengalihan ke tanaman lainnya, Kebun Singkong hanya untuk konsumsi sendiri. Petani Singkong Bapak Ahmad di Curahdami mengatakan kesulitan untuk mendapatkan kualitas singkong yang baik karena harus bersaing dengan daerah lain yang lebih bagus kualitas singkongnya sehingga singkong yang mereka tanam untuk konsumsi sendiri selain juga untuk diolah menjadi olahan singkong yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi seperti keripik singkong. Dengan semakin menurunnya areal lahan, produktivitas dan produksi Singkong di Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Kabupaten Bondowoso membuat proteksi terhadap Tanaman Singkong dengan cara membuat pengembangan pertanian dengan pola metode zonic (pewilayahan tanaman) yang lebih dikenal dengan cluster tape di empat kecamatan yaitu Kecamatan Wringin, Curahdami, Tamanan dan Pakem. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bapeda Ir Matsakur M,Si.

Industri Tape Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso sebagai sentra dari Industri Tape di Jawa Timur tercatat memiliki 175 usaha tape/olahan tape dengan menyerap tenaga kerja rata-rata sebanyak 1.225 orang (Dinas koperasi dan perindustrian Kabupaten Bondowoso). Data tersebut berarti industri tape bondowoso dapat menyerap 3.25 persen dari total pekerja sektor industri di bondowoso pada tahun 2016. Wawancara peneliti dengan Ibu Nurcahyaningrum, STP selaku staf seksi agro dan hasil hutan Dinas Koperasi dan Perindustrian mengungkapkan

“.....industri tape di Kabupaten bondowoso tercatat sejumlah 175 usaha tape maupun olahan tape dengan rata-rata tenaga kerja 5 sampai 7 orang setiap usaha jadi rata-rata tenaga kerja yang terserap dalam industri tape sebanyak 1.225 orang...”

Berdasarkan Data dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Bondowoso, Jumlah Industri tape terbanyak ada di Kecamatan wringin dengan jumlah 61 industri usaha tape disusul oleh Kecamatan Binakal sebanyak 48 usaha tape dan Kecamatan Bondowoso sebanyak 11 usaha tape. Produksi Usaha industri tape bermacam-macam sekali produksi 1 ton per hari dengan rata-rata tenaga kerja 5 sampai 7 orang, ada juga

diatas 1 ton dengan rata-rata tenaga kerja 10 orang. Sesuai dengan pernyataan ibu Nurcahyaningrum seksi agro dan hasil hutan Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Bondowoso.

A. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Ketersediaan Bahan Baku Singkong untuk Produk Unggulan Daerah (Tape)

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Cuaca dan Kondisi Geografis

Singkong/ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan yang paling banyak di produksi di kabupaten Bondowoso. Singkong merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh didaerah tropis dengan tanah yang tidak terlalu subur dengan sistem pengairan yang baik. Selain itu Cuaca di Bondowoso tergolong baik karena belum ada perusahaan besar dan pengguna kendaraan tidak padat yang menyebabkan udara tidak terlalu berpolusi. Sehingga Faktor cuaca dan kondisi geografis Kabupaten Bondowoso sangat cocok untuk tanaman singkong varietas unggul.

b. Dukungan atau Proteksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menjaga ketersediaan Bahan Baku singkong sebagai bahan baku produk Unggulan Daerah. Proteksi tersebut melalui strategi pengembangan pertanian dengan metode Zonic/Pewilayahan tanaman yang dikenal dengan kampung tape/cluster tape meliputi Daerah Wringin, Curahdami, Tamanan dan Pakem.

2. Faktor Penghambat

a. Ketersediaan Bahan baku Singkong yang terus menurun setiap tahunnya karena banyaknya petani singkong yang beralih pada komoditas lainnya seperti kopi, jagung dan padi.

b. Tidak adanya dukungan pemerintah atas teknologi modern menyebabkan sistem pertanian singkong di Kabupaten Bondowoso masih bersifat tradisional dan belum dapat memberikan keuntungan yang maksimal pada petani dari sisi pengelolaan tanam.

c. Petani Singkong/Ubi kayu sering kesulitan mendapatkan akses modal maupun pasar dalam melakukan usaha pertaniannya karena pinjaman diberikan dengan anggunan dan harga yang lebih ditentukan oleh para pemberi pinjaman.

d. Tidak ada bimbingan terkait peningkatan keterampilan (life skill).

- e. Ketersediaan besek tape yang semakin berkurang dikeluhkan para industri tape dalam memenuhi kebutuhan usahanya.

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat tape (Petani Singkong, pengusaha tape, pengrajin besek tape dan pengrajin olahan tape) melalui Kebijakan Pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso

Analisis kajian penelitian ini akan lebih menganalisis pada strategi Pemberdayaan Masyarakat Tape dengan mencari Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. salah satu cara untuk memberdayakan petani adalah keberpihakan atau campur tangan pemerintah dalam pengelolaan pertanian dan hasilnya. untuk mencari strategi yang tepat mengenai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan pemerintah.

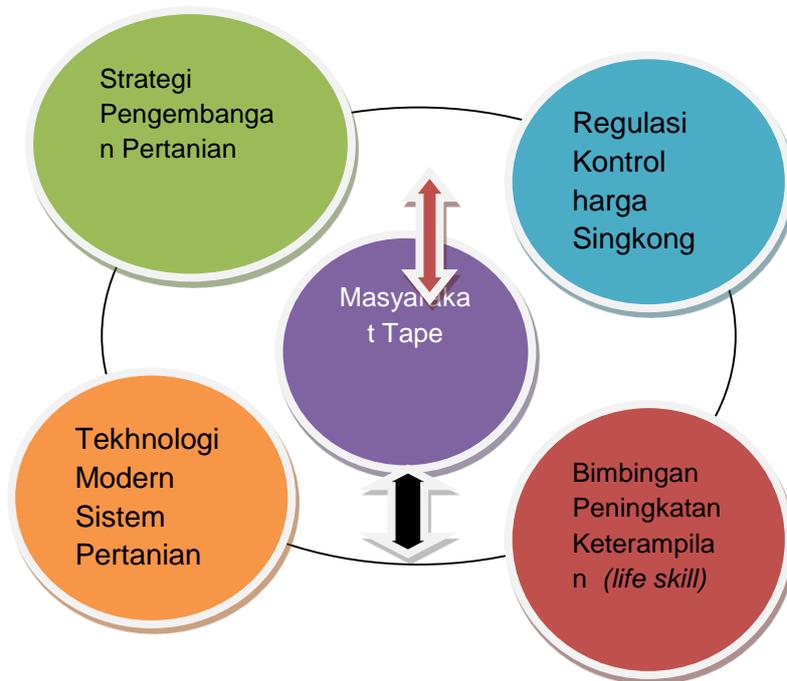
Produksi singkong di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan dari tahun 2013-2014 yang disebabkan disebabkan oleh banyaknya lahan Singkong yang beralih fungsi kepada komoditas lainnya seperti kopi dan jagung. Penyebab para Petani singkong beralih pada komoditas lainnya karena harga singkong yang terus menurun sehingga tidak menguntungkan petani. Maka untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bondowoso membuat regulasi Kebijakan melalui strategi Pengembangan pertanian dengan metode Zonic/Pewilayahan tanaman yang dikenal dengan kampung tape/cluster tape. Beberapa daerah yang termasuk kampung tape diantaranya adalah Daerah Wringin, Curahdami, Tamanan dan Pakem. Proteksi tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan Bahan Baku singkong guna memenuhi kebutuhan industri tape di Kabupaten Bondowoso.

Selain itu, Corak pertanian Petani singkong yang masih tradisional membuat petani singkong belum dapat memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan. Petani singkong juga minim keterampilan (*life skill*) sehingga singkong yang dihasilkan masih belum memenuhi standart kualitas singkong unggulan untuk bahan baku tape. Campur tangan pemerintah terhadap permasalahan diatas adalah Pemerintah bisa membuat Lembaga penelitian dan pengembangan produk Singkong unggulan (tape) di Kabupaten Bondowoso. dengan adanya lembaga penelitian dan pengembangan tentang singkong, Produk singkong dapat dikembangkan lebih baik lagi dalam hal mencari formula menemukan dan membuat singkong unggul untuk produksi tape. Selain Standart Kualitas singkong yang rendah, Petani singkong juga minim keterampilan dalam memanfaatkan bahan singkong. Padahal Singkong merupakan bahan tanaman yang dapat diolah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti mengolah

singkong menjadi keripik. Pemerintah juga harus turut campur tangan dalam penetapan harga singkong. Dalam hal ini, Dinas Pertanian akan turut menentukan harga hasil pertanian dan mengendalikan harga supaya layak bagi masyarakat.

Permasalahan lebih lanjut adalah terkait akses modal dan Pasar. Minimnya modal untuk pengembangan pertanian membuat petani kesulitan untuk mengembangkan hasil pertanian dengan kesulitannya memenuhi pasokan bibit, pupuk yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Maka dalam hal ini dibutuhkan andil pemerintah dalam memberikan modal dengan suku bunga yang rendah kepada petani singkong. Begitu juga dengan akses pasar, petani singkong kesulitan dengan penjualan hasil singkong. Maka dalam hal ini, diperlukan peran pemerintah dengan memberikan akses pasar pada mereka. Seperti contoh di lumajang yang terkenal dengan pisangnya. Pemerintah lumajang dalam hal ini menyediakan pasar khusus pisang bagi petani pisang untuk menjualnya kepada tengkulak atau konsumen langsung. Maka dengan mencontoh lumajang, pemerintah kabupaten Bondowoso juga dapat menyediakan pasar khusus singkong kepada para pengusaha industri tape ataupun konsumen langsung terutama konsumen yang memanfaatkan singkong untuk bahan olahan lebih lanjut. Sehingga pemerintah dalam hal ini turut menjadi fasilitator dalam membantu petani menjual hasil pertaniannya. Pemerintah memelihara *icon* daerah sebagai Kota tape dengan mengadakan even-even khusus misalnya hari tape yang pada hari itu semua instansi menyuguhkan tape dalam jamuan makannya begitu juga diadakan pameran yang menampilkan tape khas bondowoso dan semua hasil olahan tape seperti prol tape dll. Pada hari tape semua masyarakat bondowoso bebas menikmati tape yang telah disediakan pemerintah dengan mengundang para industri tape yang ada di Kabupaten Bondowoso

Gambar 1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Regulasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso



Sumber : Hasil analisa

PENUTUP

Penurunan produksi Singkong dari tahun 2013-2016 disebabkan karena Banyaknya petani singkong yang beralih menanam pada komoditas pangan lainnya seperti kopi, padi dan jagung. Minimnya keterampilan (*life skill*) yang dimiliki oleh petani singkong dalam memanfaatkan hasil olahan singkong. Ketidakstabilan harga singkong membuat petani sering mengalami kerugian dengan seringnya harga singkong berada pada level paling rendah dalam penjualannya dan kesulitan dalam hal akses modal dan akses pasar yang sering dikeluhkan petani singkong dalam memenuhi kebutuhan tanam singkong dan penjualan singkong. Dari beberapa permasalahan tersebut maka Strategi Pemberdayaan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso seperti Membuat regulasi dengan melakukan proteksi terhadap daerah pertanian Singkong dan melindungi industri tape mulai hulu hingga hilir. Melindungi hulu yaitu memperluas lahan tanaman singkong dengan regulasi untuk memastikan lahan singkong tetap bisa memenuhi kebutuhan industri tape Bondowoso sedangkan hilir yaitu mengembangkan produk-produk singkong sehingga identitas Bondowoso sebagai kota tape terus dipertahankan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga perlu untuk membuat Lembaga penelitian dan pengembangan produk Singkong unggulan untuk produksi

tape. Bimbingan peningkatan keahlian untuk peningkatan Sumber daya manusia (peningkatan *life skill* pengrajin) dan memberikan bantuan Teknologi tepat guna (modernisasi peralatan pertanian). Pemerintah harus mempunyai regulasi terkait dengan kontrol harga dasar Singkong dan Pemerintah memberikan kemudahan dalam permodalan dan memberikan akses pasar bagi petani singkong

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Beth r. Crisp, Hal swerissen and Stephen J. Duckett, 2000; Four approaches to capacity building in health: consequences for measurement and accountability; *Health Promotion International Vol. 15, No. 2* © Oxford University Press 2000.
- Christiaan Grootaert and Thierry van Bastelaer (editor), 2002, Understanding and Measuring Social Capital A Multidisciplinary Tool for Practitioners, World Bank, New York. Hal. 4.
- Chambers, R. (1985). Rural development : putting the last first. London ; New York:Longman.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Esman, Milton J., Uphoff, Norman T; 1984; Local Organizations Intermediaries in Rural Development; Cornell University Press; Ithaca and London.
- Friedman, John, 1992. Empowerment The Politics of Alternative Development.Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Ife, J.W., 1995. Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analisis and Practice. Melbourne : Longman.
- Narayan, D. 1999. Bonds and Bridges; Social Capital and Poverty. Washington DC. World Bank.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial Jakarta: Gramedia.
- Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development; An Analytical Sourcebook. West Hartford. Kumarian Press.
- SlametWidodo, 2008, Kelembagaan, Modal sosial Dan Pembangunan dalam [http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/kelembagaan-kapital-sosial-dan-pembangunan/\(diakses](http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/kelembagaan-kapital-sosial-dan-pembangunan/(diakses) 20 januari 2011).

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Febrilina. 2016. Ketersediaan Bahan baku singkong untuk produk unggulan daerah di Kabupaten Jember. Skripsi. Tidak diterbitkan.
- Indrayati, Rosita. 2013. Pemberdayaan petani singkong di Kabupaten Jember. Penelitian Unggulan BOPTN.
- Purbathin Hadi, Agus. 2013. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Pusat Pengembangan masyarakat agrikarya.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Media massa

Bondowosokab.bps.go.id.